



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. FIDA HURASANI, S.Sos.

Jabatan : KEPALA PELAKSANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;

5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara Sesuai Standar Pelayanan Minimal;
16. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
17. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

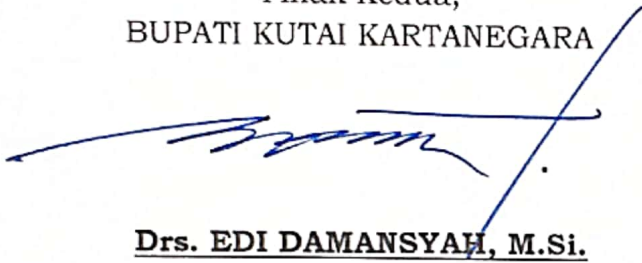
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

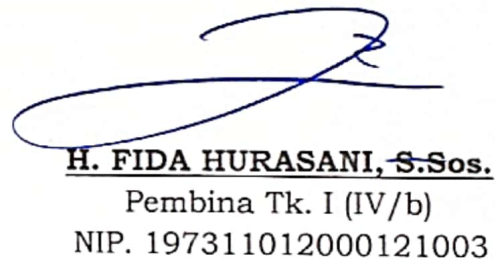
Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA PELAKSANA



H. FIDA HURASANI, S.Sos.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197311012000121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	OPD	100
3	Meningkatnya Kualitas Pelayan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	68
4	Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	15,80
		Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100
		Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Kelompok	35,44
5	Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100

6	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	12,11
7	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	13,55
8	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100
9	Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Regulasi Daerah	Dokumen	2
10	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	3
11	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
12	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100

13	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
14	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
15	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
16	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
17	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
18	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
19	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2

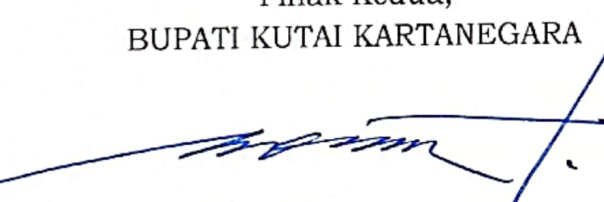
20	Melaksanakan reuiu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
21	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4
22	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
23	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan DAsar Warga Negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
24	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100
25	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.527.541.280,00	APBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	27.134.005.652,00	APBD
3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.099.895.550,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		34.761.442.482,00	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA PELAKSANA


H. FIDA HURASANI, S.Sos.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197311012000121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDY MARDIAN, SE**

Jabatan : **SEKRETARIS BPBD**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. FIDA HURASANI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;

5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan untuk perumusan alternatif kebijakan;
7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 13 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA PELAKSANA BPBD



H. FIDA HURASANI, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19731101 200012 1 003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS BPBD



EDY MARDIAN, SE
Pembina TK. I
NIP. 19670306 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN			
a	<i>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7
2.	Tersedianya Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPBD dan laporan hasil kooedinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BPBD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPBD dan laporan hasil kooedinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BPBD	Laporan	12
3.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	2
b	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
4.	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	1121
5.	Terlaksananya Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12
6.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran BPBD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran BPBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran BPBD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran BPBD	Laporan	12
c	<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>			
7.	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	6
d	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			
8.	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	6

9.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	100
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
10.	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	10
11.	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12
12.	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12
13.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12
14.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	30
15.	Terlaksananya penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12
16.	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pengelolaan Website BPBD	Dokumen	10
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
17.	Tersedianya Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	186
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
18.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12
19.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di berikan	Laporan / Orang / Bulan	12 / 222
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
20.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	Unit	50
21.	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya yang di pelihara	Unit	50
22.	Terlaksananya pemeliharaan /	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /	Unit	3

	Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	direhabilitasi		
B	Program Penanggulangan Bencana			
i	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>			
23.	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Orang	1250
j	<i>Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>			
24.	Terlaksananya Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk warga Negara maupun aparatur di kawasan rawan bencana	Jumlah warga Negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	300
25.	Tersedianya Dokumen Hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Dokumen	2
26.	Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	Unit	12
27.	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan untuk untuk pencegahan dan kesiapsiagaan pada kawasan-kawasan strategis kabupaten/kota	Jumlah kawasan yang di tingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	2
28.	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3P)	Laporan	12
29.	Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi untuk	Jumlah Dokumen rencana kontijensi yang di legalisasi	Dokumen	1

	setiap bencana prioritas di daerah			
k	<i>Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana</i>			
30.	Terlaksananya Koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan	1
31.	Terlaksananya respon cepat darurat bencana penanganan awal untuk penetapan status darurat bencana paling lama 1 x 24 Jam	SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang di tetapkan paling lama 1 x 24 Jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Dokumen	1
32.	Terlaksananya upaya untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman	Jumlah korban yang berhasil di temukan, di tolong, dan di evakuasi per jenis kejadian bencana	Orang	20792
33.	Terdistribusinya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	273
34.	Terlaksananya pengerahan da pengorganisasian komando penanganan darurat bencana tingkat provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi system komando penanganan darurat bencaa	Laporan	3
35.	Terlaksananya Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah dalam penanganan awal untuk KLB yang di tingkatkan statusnya menjadi darurat bencana non alam paling lama 1 x 24 jam	SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang di tetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu	Dokumen	2
l	<i>Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana</i>			
36.	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan penanggulangan bencana Di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan penanggulangan bencana Di Daerah	Dokumen	2
37.	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaab Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaab Bencana Daerah	Dokumen	2
38.	Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	4

39.	Tersedianya Data Dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data Dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	1
40.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	6
C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran			
m	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten</i>			
41.	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Laporan	60
42.	Tersedianya Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket dan penyelamatan / evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan / evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Dokumen	12
43.	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Unit	75
44.	Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Orang	25
45.	Tersedianya dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah/kota dalam pencegahan, penanggulangan, kebakaran dan penyelamatan kebaratan dan non kebakaran	Dokumen	4
n	<i>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</i>			
46.	Terlaksananya	Jumlah warga masyarakat yang	Orang	100

	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat setiap tahunnya	mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya		
47.	Tersedianya Dokumen pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran di desa dan kelurahan setiap tahunnya	Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup system ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	Desa / Kelurahan	8
48	Tersedianya dokumen yang memuat SKKL pada desa/kelurahan yang telah tersedia dukungan sarana dan prasarana	Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL desa/kelurahan yang telah tersedia dukungan spras damkar	Dokumen	4
0	<i>Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</i>			
49	Tersedianya sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal sesuai standar teknis	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis	Unit	50
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Pengelola Aset	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan	Persen	100

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		27.134.005.652,-
a	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000,-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000,-	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000,-	APBD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,-	APBD
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.546.694.126,-	
4	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	13.125.745.126,-	APBD
5	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	86.000.000,-	APBD
6	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	334.949.000,-	APBD
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150.000.000,-	
7	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	150.000.000,-	APBD
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.025.000,-	
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	72.025.000,-	APBD
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-	66.000.000,-	APBD

	undangan		
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.515.500.000,-	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000,-	APBD
11	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	855.000.000,-	APBD
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,-	APBD
13	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	50.000.000,-	APBD
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	350.000.000,-	APBD
15	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	75.000.000,-	APBD
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.000.000,-	APBD
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.025.000.000,-	
17	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	6.025.000.000,-	APBD
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.302.915.806,-	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	300.000.000,-	APBD
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.002.915.806,-	APBD
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.005.870.720,-	

20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	591.400.000,-	APBD
21	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	75.000.000,-	APBD
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	339.470.720,-	
B	Program Penanggulangan Bencana		4.099.895.550,-
i	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.000.000.000,-	
23	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.000.000.000,-	APBD
j	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.499.895.550,-	
24	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	650.000.000,-	APBD
25	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	149.999.750,-	APBD
26	Penyediaan Peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	149.895.800,-	APBD
27	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	150.000.000,-	APBD
28	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000,-	APBD
29	Penyusunan Rencana Kontijensi	250.000.000,-	APBD
k	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	1.100.000.000,-	

30	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	100.000.000,-	APBD
31	Respon Cepat darurat Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000,-	APBD
32	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000,-	APBD
33	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000,-	APBD
34	Aktivasi Sistim Komando Penanganan Darurat Bencana	100.000.000,-	APBD
35	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	100.000.000,-	APBD
1	Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana	500.000.000,-	
36	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000,-	APBD
37	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000,-	APBD
38	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000,-	APBD
39	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	130.000.000,-	APBD
40	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	130.000.000,-	APBD
C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		3.527.541.280,-
m	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah	1.613.336.280,-	

	Kabupaten/Kota		
41	Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	525.000.000,-	APBD
42	Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran	150.000.000,-	APBD
43	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	600.729.000,-	APBD
44	Pembinaan Aparatur Pemadam kebakaran	137.607.280,-	APBD
45	Penyelenggaraan Kerjasama Dan Koordinasi Antar Daerah berbatasan, Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	200.000.000,-	APBD
n	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	1.764.205.000,-	
45	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	200.000.000,-	APBD
46	Pembentukan Dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	324.205.000,-	APBD
47	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana	1.240.000.000,-	APBD
O	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	150.000.000,-	

48	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Dan Evakuasi	150.000.000,-	APBD
Jumlah Anggaran		34.761.442.482,-	

Kutai Kartanegara, 13 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA PELAKSANA BPBD



H. FIDA HURASANI, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19731101 200012 1 003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS BPBD



EDY MARDIAN, SE
Pembina TK. I
NIP. 19670306 199303 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDY HARYADI, A.Pi**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. FIDA HURASANI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

5. Melaksanakan Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan untuk perumusan alternatif kebijakan;
6. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

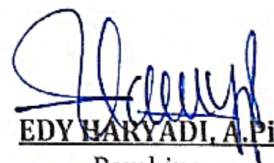
Kutai Kartanegara, 13 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA PELAKSANA BPBD



H. FIDA HURASANI, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19731101 200012 1 003

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENCEGAHAN &
KESIAPSIAGAAN**



EDY HARYADI, A.Pi
Pembina
NIP. 19750619 200112 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
B	Program Penanggulangan Bencana			
i	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>			
1	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Orang	1250
j	<i>Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>			
2	Terlaksananya Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk warga Negara maupun aparatur di kawasan rawan bencana	Jumlah warga Negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	300
3	Tersedianya Dokumen Hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Dokumen	2
4	Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	Unit	12
5	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan untuk untuk pencegahan dan kesiapsiagaan pada kawasan-kawasan strategis kabupaten/kota	Jumlah kawasan yang di tingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	2
6	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3P)	Laporan	12
7	Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi untuk	Jumlah Dokumen rencana kontijensi yang di legalisasi	Dokumen	1

	setiap bencana prioritas di daerah			
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan	Persen	100

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
B	Program Penanggulangan Bencana		
h	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.000.000.000,-	
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.000.000.000,-	APBD
i	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.499.895.550,-	
2	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	650.000.000,-	APBD
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	149.999.750,-	APBD
4	Penyediaan Peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	149.895.800,-	APBD
5	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	150.000.000,-	APBD
6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000,-	APBD
7	Penyusunan Rencana Kontijensi	250.000.000,-	APBD
Jumlah Anggaran		2.499.895.550,-	

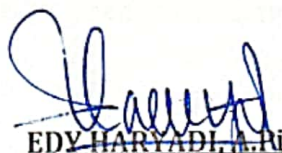
Kutai Kartanegara, 13 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA PELAKSANA BPBD



H. FIDA HURASANI, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19731101 200012 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN



EDY HARYADI, S.Pi
Pembina
NIP. 19750619 200112 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDAL, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BPBD**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. FIDA HURASANI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

5. Melaksanakan Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan untuk perumusan alternatif kebijakan;
6. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 13 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA PELAKSANA BPBD


H. FIDA HURASANI, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19731101 200012 1 003

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN
LOGISTIK**


ABDAL, S.Sos
Penata TK. I
NIP. 19730515 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
B	Program Penanggulangan Bencana			
k	<i>Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana</i>			
1	Terlaksananya Koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan	1
2	Terlaksananya respon cepat darurat bencana penanganan awal untuk penetapan status darurat bencana paling lama 1 x 24 Jam	SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang di tetapkan paling lama 1 x 24 Jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Dokumen	1
3	Terlaksananya upaya untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman	Jumlah korban yang berhasil di temukan, di tolong, dan di evakuasi per jenis kejadian bencana	Orang	20792
4	Terdistribusinya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	273
5	Terlaksananya pengerahan da pengorganisasian komando penanganan darurat bencana tingkat provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi system komando penanganan darurat bencaa	Laporan	3
6	Terlaksananya Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah dalam penanganan awal untuk KLB yang di tingkatkan statusnya menjadi darurat bencana non alam paling lama 1 x 24 jam	SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang di tetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu	Dokumen	2
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret	Persen	100

		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan	Persen	100

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
B	Program Penanggulangan Bencana		
k	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana		
1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	100.000.000,-	APBD
2	Respon Cepat darurat Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000,-	APBD
3	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000,-	APBD
4	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000,-	APBD
5	Aktivasi Sistim Komando Penanganan Darurat Bencana	100.000.000,-	APBD
6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	100.000.000,-	APBD
Jumlah Anggaran		1.100.000.000,-	

Kutai Kartanegara, 13 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA PELAKSANA BPBD



H. FIDA HURASANI, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19731101 200012 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK



ABDAL, S.Sos
Penata TK. I / III d
NIP. 19730515 200012 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAHARUDDIN SYAFRUDDIN, ST**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI BPBD**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. FIDA HURASANI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

5. Melaksanakan Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan untuk perumusan alternatif kebijakan;
6. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

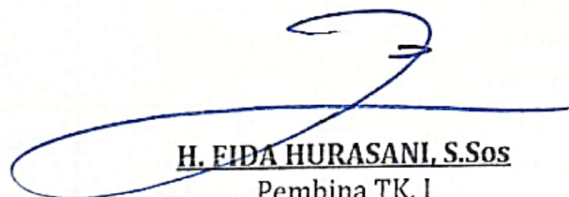
Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

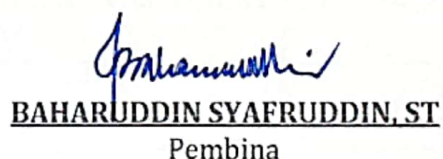
Kutai Kartanegara, 13 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA PELAKSANA BPBD



H. EIDA HURASANI, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19731101 200012 1 003

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI BPBD**



BAHARUDDIN SYAFRUDDIN, ST
Pembina
NIP. 19760705 200604 1 025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
B	Program Penanggulangan Bencana			
1	<i>Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana</i>			
1	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan penanggulangan bencana Di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan penanggulangan bencana Di Daerah	Dokumen	2
2	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	2
3	Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	4
4	Tersedianya Data Dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data Dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	1
5	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulan bencana	Laporan	6
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan	Persen	100

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
B	Program Penanggulangan Bencana		
1	Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana		
1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000,-	APBD
2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000,-	APBD
3	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000,-	APBD
4	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	130.000.000,-	APBD
5	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	130.000.000,-	APBD
Jumlah Anggaran		500.000.000,-	

Kutai Kartanegara, 13 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA PELAKSANA BPBD



H. EIDA HURASANI, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19731101 200012 1 003

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI BPBD**



BAHARUDDIN SYAFRUDDIN, ST
Pembina
NIP. 19760705 200604 1 025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDAL, S.Sos**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN BPBD**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. FIDA HURASANI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

5. Melaksanakan Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan untuk perumusan alternatif kebijakan;
6. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

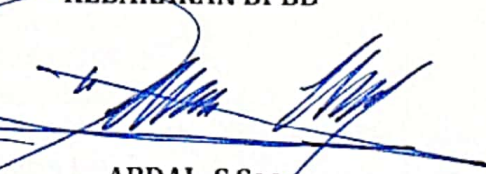
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 13 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA PELAKSANA BPBD


H. FIDA HURASANI, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19731101 200012 1 003

Pihak Pertama,
**Plt. KEPALA BIDANG PEMADAM
KEBAKARAN BPBD**


ABDAL, S.Sos
Penata TK. I
NIP. 19730515 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran			
m	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten</i>			
1	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Laporan	60
2	Tersedianya Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket dan penyelamatan / evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan / evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Dokumen	12
3	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Unit	75
4	Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Orang	25
5	Tersedianya dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah/kota dalam pencegahan, penanggulangan, kebakaran dan penyelamatan kebaratan dan non kebakaran	Dokumen	4
n	<i>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</i>			
6	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	Orang	100

	dan edukasi masyarakat setiap tahunnya			
7	Tersedianya Dokumen pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran di desa dan kelurahan setiap tahunnya	Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup system ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	Desa / Kelurahan	8
8	Tersedianya dokumen yang memuat SKKL pada desa/kelurahan yang telah tersedia dukungan sarana dan prasarana	Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL desa/kelurahan yang telah tersedia dukungan sapras damkar	Dokumen	4
0	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			
9	Tersedianya sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal sesuai standar teknis	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis	Unit	50
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan alternatif kebijakan	Persen	100

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH****KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		
m	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.613.336.280,-	
1	Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	525.000.000,-	APBD
2	Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran	150.000.000,-	APBD
3	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	600.729.000,-	APBD
4	Pembinaan Aparatur Pemadam kebakaran	137.607.280,-	APBD
5	Penyelenggaraan Kerjasama Dan Koordinasi Antar Daerah berbatasan, Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	200.000.000,-	APBD
n	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	1.764.205.000,-	
6	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	200.000.000,-	APBD
7	Pembentukan Dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	324.205.000,-	APBD
8	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui	1.240.000.000,-	APBD

	Penyediaan Sarana Dan Prasarana		
o	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	150.000.000,-	
9	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan Dan Evakuasi	150.000.000,-	APBD
Jumlah Anggaran		3.527.541.280,-	

Kutai Kartanegara, 13 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA PELAKSANA BPBD


H. FIDA HURASANI, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19731101 200012 1 003

Pihak Pertama,
**Plt. KEPALA BIDANG PEMADAM
KEBAKARAN BPBD**


ABDAL, S.Sos
Penata TK. I
NIP. 19730515 200012 1 001